



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) HUKUM ACARA PTUN

Oleh:

Hamzah Fansuri, S.H, M.H

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
2025**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE MATA KULIAH:	RUMPUN MATA KULIAH:	BOBOT (SKS):	SEMESTER:	TANGGAL PENYUSUNAN:	TANGGAL MULAI BERLAKU:
Hukum Acara PTUN	HES62331	Hukum Umum	T: 2 SKS P: 0 SKS	VI/ A,B,C,D	30 Agustus 2025	1 September 2025
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS  Hamzah Fansuri, M.H	KOORDINATOR RUMPUN MATA KULIAH  <u>Ahmad Rofii, MA., LL.M., Ph.D</u> NIP : 197607252001121002				
		KETUA PROGRAM STUDI  <u>Dr. Afif Muamar, M.HI.</u> NIP. 19851219 201503 1 007				
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI (CPL)	CPL-03	Menguasai teori, sumber, dan metode istinbat hukum Islam (<i>ushul fiqh</i> dan <i>qawa'id fiqhiyah</i>) serta hukum positif Indonesia yang terkait dengan hukum keluarga Islam (<i>ahwal al-syakhsiyyah</i>), termasuk ilmu hukum, filsafat hukum Islam, dan sejarah hukum Islam (<i>tarikh tasyri'</i>).			
		CPL-06	Mampu mengintegrasikan Hukum Ekonomi Syariah dengan pendekatan interdisipliner untuk mendukung profesi sebagai peneliti, fasilitator, maupun konsultan hukum syariah.			
		CPL -07	Mampu mengaplikasikan hukum positif dan hukum Islam dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta adaptif terhadap perkembangan digitalisasi hukum dan industri halal.			

		CPL 09	Mampu mengimplementasikan prosedur beracara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, baik litigasi maupun nonlitigasi (arbitrase/mediasi), sebagai kompetensi utama praktisi hukum di pengadilan maupun lembaga arbitrase syariah.		
		CPL 10	Mampu menyusun, menelaah, dan mengkaji kontrak/perjanjian syariah serta dokumen hukum bisnis, sehingga relevan dengan profesi notaris, legal drafter, corporate paralegal, maupun penasihat hukum korporasi.		
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CP-MK)	M1	Menjelaskan kompetensi PTUN, objek sengketa TUN, tenggat, dan tata cara pengajuan gugatan/penundaan.		
		M2	Menyusun berkas gugatan TUN dan permohonan penundaan terkait keputusan tata usaha negara.		
		M3	Melakukan simulasi persidangan PTUN dan menyusun kesimpulan perkara.		
	RELEVANSI DENGAN SDG'S	SDG 4 – Quality Education: Pengantar & sejarah PTUN, meningkatkan mutu pendidikan hukum. SDG 16 – Peace, Justice, and Strong Institutions: Struktur, subjek/objek sengketa, kompetensi, proses, sengketa khusus, peradilan elektronik, upaya hukum, gugatan, pemeriksaan, pembuktian, hingga putusan PTUN yang semuanya memperkuat akses keadilan, transparansi, dan kelembagaan hukum.			
RELASI DAN TAKSONOMI CP		KODE CPL	CPMK	ASPEK/ TAKSONOMI	LEVEL TAKSONOMI
Menguasai teori, sumber, dan metode istinbat hukum Islam (<i>ushul fiqh</i> dan <i>qawa'id fiqhiyah</i>) serta hukum positif Indonesia yang terkait dengan hukum keluarga Islam (<i>ahwal al-syakhshiyyah</i>), termasuk ilmu hukum, filsafat hukum Islam, dan sejarah hukum Islam (tarikh tasyri').		CPL-03	M1. Menjelaskan kompetensi PTUN, objek sengketa TUN, tenggat, dan tata cara pengajuan gugatan/penundaan.	Pengetahuan	C2
Memiliki keterampilan komunikasi hukum, baik lisan maupun tulisan, secara profesional dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing untuk kebutuhan akademisi,		CPL-06	M2. Menyusun berkas gugatan TUN dan permohonan penundaan terkait keputusan tata usaha negara.	Pengetahuan	C2

praktisi hukum, dan legalpreneur di tingkat nasional maupun internasional.				
Mampu mengaplikasikan hukum positif dan hukum Islam dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta adaptif terhadap perkembangan digitalisasi hukum dan industri halal.	CPL-07	M3. Melakukan simulasi persidangan PTUN dan menyusun kesimpulan perkara.	Menganalisis	C4
Mampu mengimplementasikan prosedur beracara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, baik litigasi maupun nonlitigasi (arbitrase/mediasi), sebagai kompetensi utama praktisi hukum di pengadilan maupun lembaga arbitrase syariah.	CPL-09			
Mampu menyusun, menelaah, dan mengkaji kontrak/perjanjian syariah serta dokumen hukum bisnis, sehingga relevan dengan profesi notaris, legal drafter, corporate paralegal, maupun penasihat hukum korporasi.	CPL-10	M3. Melakukan simulasi persidangan PTUN dan menyusun kesimpulan perkara.	Menganalisis	C4
DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Hukum Acara Tata Usaha Negara adalah seperangkat peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan, serta cara pengadilan bertindak satu sama lain untuk menegakkan peraturan Hukum Administrasi Negara (materiil). Hukum Acara Tata Usaha Negara dapat pula disebut dengan Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara. Secara sederhana Hukum Acara diartikan sebagai Hukum Formil yang bertujuan untuk mempertahankan Hukum Materil. Mata Kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara ini menjabarkan ciri atau karakteristik Hukum Acara Tata Usaha Negara sebagai pembeda dengan Peradilan lainnya, khususnya Peradilan Umum (Perdata). Materi muatan mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara ini adalah membahas dasar-dasar Tata Usaha Negara, subyek dan obyek sengketa Tata Usaha Negara, Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, alur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, gugatan, pembuktian, putusan, upaya hukum dan eksekusi. Dengan mengikuti mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara, diharapkan mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisa tahap-tahap beracara di Peradilan Tata Usaha Negara.			

MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN	1. Pengantar dan ruang lingkup Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2. Sejarah dan perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara 3. Struktur organisasi tata usaha negara dan administrasi pemerintahan 4. Perihal Subjek dan Objek Sengketa Tata Usaha Negara 5. Kompetensi Peradilan absolute dan relative Tata Usaha Negara 6. Proses penyelesaian Peradilan Tata Usaha Negara 7. Sengketa Khusus Di Peradilan Tata Usaha Negara 8. Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara 9. Upaya Hukum internal, banding, kasasi, dan peninjauan kembali Peradilan Tata Usaha Negara 10. Pengajuan Gugatan Ke Peradilan Tata Usaha Negara 11. Pemeriksaan Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara 12. Pembuktian Dalam Peradilan Tata Usaha Negara 13. Putusan dan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara
REFERENSI	1. Adriaan W. Bidner, <i>"Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia (Sebuah Studi sosio- legal)"</i>, HuMa, Jakarta 2. Ali, Abdullah, <i>"Teori dan Praktik Hukum Acara peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen"</i>, Kencana, Jakarta. 3. Asmuni, <i>"Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara"</i>, Setara Press, Malang 4. Benyamin Mangkudilaga, <i>Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara</i>, Angkasa: Bandung. 5. Badriyah Khaleed, <i>"Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara"</i>, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 6. Indroharto <i>"Peradilan Tata Usaha Negara"</i>, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta. 7. Indroharto, <i>"Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara"</i>, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta. 8. Irfan Fachruddin, <i>"Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah"</i>, PT. Alumni, Bandung 9. Jazim Hamidi, <i>"Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia. (Upaya Menuju Clean and stable Government)"</i>, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 10. Rozali Abdullah, <i>"Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara"</i>, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 11. SF. Marbun, <i>"Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia"</i>, UII Press, Yogyakarta

	12. Sudikno Mertokusumo, <i>“Hukum Acara Perdata”</i>, Liberty, Yogyakarta 13. Sudarsono, Rabbenstain Izroiel, <i>“Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara (Konvensional dan Elektronik)</i>, Kencana, Jakarta. 14. Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma, <i>“Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E Ligitasi)</i>, Kencana, Jakarta. 15. Rachmat Soemitro, <i>“Peradilan Tata Usaha Negara”</i>, Eresco: Bandung. 16. Tim Mahkamah Agung, <i>“Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat dari Beberapa Sudut Pandang”</i>. Mahkamah Agung RI, Jakarta	
Integrasi Penelitian dan PKM	1. Muchsan, <i>Pengantar Hukum Administrasi Negara</i>, Liberty, Yogyakarta 2. E. Utrecht, <i>Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia</i>, Pustaka Intermasa,Jakarta 3. Mr. W.F. Prins dan R Kosim Adisaoutro, <i>Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara</i>, Pradnya Paramita,Jakarta Sebagai Rujukan/Referensi, Materi pembelajaran	
MEDIA PEMBELAJARAN	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	Portal akademik, LMS Pillar, GMeet, <i>Power Point</i> , <i>Hand Out</i> , Video Pembelajaran, E-Modul.	Laptop, Smartphone
TEAM TEACHING	HAMZAH FANSURI,S.H,M.H	
MATA KULIAH SYARAT	-	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami rencana	Learning Contract:	a. Ketepatan mahasiswa dalam	Non Tes: ➤ Meringkas	5%	Bentuk : Kuliah dengan	1. PB: 2 x50'	Mahasiswa dilatih berdiskusi untuk	Portal akademik,	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	perkuliahan dan sistem penilaian yang akan digunakan dalam pembelajaran	a. Kontrak perkuliahan b. Outline materi perkuliahan hukum acara PTUN	menyimpulkan CPL, maksud, tujuan perkuliahan, sistem perkuliahan b. Ketepatan mahasiswa dalam mengelompokkan materi perkuliahan hukum acara PTUN	materi kontrak perkuliahan ➤ Partisipasi		Model <i>Direct Instruction</i> ▪ Metode 1. Synchronous 2. Diskusi 3. Ceramah 4. Tanya jawab	2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	menyimpulkan CPL, tujuan perkuliahan dan mengelompokkan materi perkuliahan dan menyimpulkan maksud, tujuan, dan sistem perkuliahan	LMS Pillar, GMeet, <i>Power Point</i> , <i>Hand Out</i> , E-Modul.	
2	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan kembali tentang Ruang Lingkup Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	Kehadiran Partisipasi aktif Memahami materi secara aktif -Ketepatan menjelaskan materi	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan kemampuan komunikasi Bentuk non-test:	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode 1. asynchronous 2. Ceramah interaktif 3. diskusi kelompok	1. PB: 2 x 50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan kembali tentang Ruang Lingkup Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	LMS Pillar, PowerPoint, e-modul	Modul 1 KB 1

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Ringkasan hasil rujukan			4. tanya jawab				
			Tugas-1: Mengerjakan Tes Formative dan Latihan (Esai)[PT: 2x60'] [KM: 2x60']							
3	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan kembali tentang sejarah dan perkembangan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	Kehadiran Partisipasi aktif Memahami materi secara aktif -Ketepatan menjelaskan materi	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan kemampuan komunikasi Bentuk non-test: Ringkasan hasil rujukan	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning</i> (CTL) Metode Ceramah interaktif, asynchronous, diskusi kelompok, tanya jawab	1. PB: 2 x50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Sejarah dan perkembangan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	LMS, PowerPoint, e-modul, video	Modul 1, KB 2
			Tugas-2: Mengerjakan Tes Formative dan berdiskusi pada Forum Diskusi[PT: 2x60'] [KM: 2x60']							
4	Mahasiswa mengerti dan memahami serta dapat menjelaskan tentang Struktur organisasi Peradilan tata usaha negara dan administrasi pemerintahan	Struktur organisasi Peradilan tata usaha negara dan administrasi pemerintahan	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan kemampuan komunikasi	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning</i> (CTL) Metode	1. PB: 2 x50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Struktur organisasi peradilan tata usaha negara dan administrasi pemerintahan	LMS, PowerPoint, e-modul, video	Modul 2 KB 1

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	administrasi pemerintahan		Bentuk non-test: Ringkasan materi			Ceramah interaktif, asynchronous, diskusi kelompok, tanya jawab				
			Tugas-3 Menyusun ringkasan dan mampu menjelaskan kembali tentang Subjek dan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (BT-BM: 2x2x 60)							
5	Mahasiswa mengerti dan Memahami Perihal Subjek dan Objek Sengketa Tata Usaha Negara	Ketepatan Menjelaskan Perihal Subjek dan Objek Sengketa Tata Usaha Negara	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan kemampuan komunikasi Bentuk non- test: Ringkasan materi	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, asynchronous, diskusi kelompok, tanya jawab	1. PB: 2 x50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Perihal Subjek dan Objek Sengketa Tata Usaha Negara	LMS, PowerPoint, e-modul, video, kitab hadis digital	Modul 2 KB 2
			Tugas-4: Menyusun ringkasan tentang Kopetensi Peradilan Tata Usaha (BT-BM: 2x2x 60)							
6	Mahasiswa mengerti dan Memahami kompetensi	Ketepatan Menjelaskan kometensi peradilan absolute dan	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama	a. Observasi (S) b. Tes tertulis,	10%	Bentuk : Kuliah dengan Model <i>Contextual</i>	1. PB: 2 x50' 2. PT: 2 x 60'	kompetensi peradilan absolute dan relativ	LMS, PowerPoint, e-modul, video	• Modul 2 KB 3

[illegible]

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	peradilan absolute dan relative Peradilan tata usaha negara	relative Di Peradilan Tata Usaha Negara	dan kemampuan komunikasi Bentuk non- test: Ringkasan materi	penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)		<i>Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, asynchronous, diskusi kelompok, tanya jawab	3. KM: 2 x 60'	Peradilan tata usaha negara		
Tugas-5: Menyusun ringkasan tentang Kopetensi Peradilan Tata Usaha (BT-BM: 2x2x 60)										
7	Mahasiswa mengerti dan Memahami Proses Penyelesaian Peradilan Tata Usaha Negara	Ketepatan Menjelaskan proses penyelesaian Pada Peradilan Tata Usaha Negara	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan kemampuan komunikasi Bentuk non- test: Ringkasan materi	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU)(KK)	10%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, synchronous, diskusi kelompok, tanya jawab	1. PB: 2 x 50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Proses penyelesaian Pada Peradilan Tata Usaha Negara	LMS, PowerPoint, e-modul, video	Modul 3 KB 1

			Tugas-6: Menyusun ringkasan tentang Kopetensi Peradilan Tata Usaha (BT-BM: 2x2x 60)
--	--	--	---

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER									
9	Mahasiswa mengerti dan memahami serta mampu Menjelaskan sengketa khusus di Peradilan Tata Usaha Negara	Ketepatan dalam menjawab pertanyaan yang diberikan	Kriteria: Ketepatan dalam Menjawab soal dan tepat waktu Bentuk test: Tes Tulis	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU)(KK)	10%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, synchronous, diskusi kelompok, tanya jawab	1. PB: 2 x 50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Menjelaskan sengketa khusus Peradilan Tata Usaha Negara	LMS, PowerPoint, e-modul, video,	Modul 3 KB 2
Tugas-7: Mengerjakan Tes Formative dan Latihan (Esai)[PT: 2x60'] [KM: 2x60']										
10	Mahasiswa mengerti dan memahami serta mampu Menjelaskan Peradilan elektronik pada Peradilan Tata Usaha Negara	Ketepatan Menjelaskan Pemeriksaan pengakuan hukum acara PTUN	Kriteria: Ketajamaan analisis, Kemampuan komunikasi, danKerjasama Bentuk non-test: Ringkasan materi	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, diskusi	1. PB: 2 x 50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Menjelaskan peradilan elektronik pada Peradilan Tata Usaha Negara	LMS, PowerPoint, e-modul, video	Modul 4 KB 1

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						kelompok, tanya jawab				
			Tugas-8: Mengerjakan Tes Formative [PT: 2x60'] [KM: 2x60']							
11	Mahasiswa mengerti dan memahami serta mampu menjelaskan Upaya Hukum internal, banding, kasasi, dan peninjauan kembali Peradilan Tata Usaha Negara	Ketepatan Menjelaskan Upaya Hukum internal, banding, kasasi, dan peninjauan kembali Peradilan Tata Usaha Negara	Kriteria: Ketepatan analisis, Kemampuan komunikasi, dan Kerjasama Bentuk non- test: Ringkasan materi	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, asynchronous, diskusi kelompok, tanya jawab	1. PB: 2 x 50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Upaya Hukum internal, banding, kasasi, dan peninjauan kembali Peradilan Tata Usaha Negara	LMS, PowerPoint, e-modul, video, kitab fiki digital	Modul 4 KB 2
			Tugas-9: Mengerjakan Tes Formative [PT: 2x60'] [KM: 2x60']							
12	Mahasiswa mengerti dan memahami tentang Pengajuan Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara	Pengajuan Gugatan Ke Peradilan Tata Usaha Negara	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan kemampuan komunikasi Bentuk non- test:	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif,	1. PB: 2 x 50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	Pengajuan Gugatan Ke Peradilan Tata Usaha Negara	LMS, PowerPoint, e-modul, video	Modul 5 KB 1

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Ringkasan materi			asynchronous, diskusi kelompok, tanya jawab				
Tugas-10: Mengerjakan Tes Formative dan berdiskusi pada Forum Diskusi [PT: 2x60'] [KM: 2x60']										
13	Mahasiswa mengerti dan Memahami tentang pemeriksaan sengketa hukum acara peradilan tata usaha negara	Ketepatan menjelaskan pemeriksaan sengketa hukum acara peradilan tata usaha negara	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan kemampuan komunikasi Bentuk non- test Persentasi Kelompok	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	10%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, asynchronous, diskusi kelompok, tanya jawab	1. PB: 2 x50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	pemeriksaan sengketa hukum acara peradilan tata usaha negara	LMS, PowerPoint, e-modul, video	Modul 5 KB 2
Tugas-11: Mengerjakan Tes Formative dan berdiskusi pada Forum Diskusi [PT: 2x60'] [KM: 2x60']										
14	Mahasiswa mengerti dan Memahami tentang pembuktian hukum acara peradilan tata usaha negara	tentang pembuktian hukum acara peradilan tata usaha negara	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan kemampuan komunikasi	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja	10%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode	1. PB: 2 x50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	tentang pembuktian hukum acara peradilan tata usaha negara	LMS, PowerPoint, e-modul, video, dokumen KHI, UU terkait	Modul 6 KB 1

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Peradilan Tata Usaha Negara		Bentuk non- test Persentase Kelompok	(KU) (KK)		Ceramah interaktif, asynchronous, diskusi kelompok, tanya jawab				
Tugas-12: Mengerjakan Tes Formative dan berdiskusi pada Forum Diskusi [PT: 2x60'] [KM: 2x60']										
15	Mahasiswa mengerti dan Memahami tentang Putusan dan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara	Ketepatan menjelaskan tentang Putusan dan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara	Ketepatan tentang hubungan internasional dan perjanjian internasional	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	10%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, synchronous, diskusi kelompok, tanya jawab	1. PB: 2 x50' 2. PT: 2 x 60' 3. KM: 2 x 60'	tentang Putusan dan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara	LMS, PowerPoint, e-modul, video	Modul 6 KB 2
Tugas-13: Mengerjakan Menyusun makalah (BT -BM: 2x2x 60)										
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER									

LAMPIRAN

FORMAT RANCANGAN TUGAS

Nama Mata Kuliah : HUKUM ACARA PTUN
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Fakultas : Fakultas Syariah

SKS : 2
 Pertemuan ke : 2-15

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN :

Kode CPL	Kode CPMK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Level Taksonomi
CPL-3	M1	Menjelaskan kompetensi PTUN, objek sengketa TUN, tenggat, dan tata cara pengajuan gugatan/penundaan.	2	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan kembali tentang Ruang Lingkup Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Memahami rencana perkuliahan dan sistem penilaian yang akan digunakan dalam pembelajaran	C2 (Pemahaman)
	M2	Menyusun berkas gugatan TUN dan permohonan penundaan terkait keputusan tata usaha negara.	3	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan kembali tentang Ruang Lingkup Hukum Internasional	C4 (Analisis)
	M1	Menjelaskan kompetensi PTUN, objek sengketa TUN, tenggat, dan tata cara pengajuan gugatan/penundaan.	4	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan kembali tentang Ruang Lingkup Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	C2 (Pemahaman)
			5	Mahasiswa mengerti dan Memahami Hakiki hukum internasional	C2 (Pemahaman)

Kode CPL	Kode CPMK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Level Taksonomi
CPL-03, 06	M3	Melakukan simulasi persidangan PTUN dan menyusun kesimpulan perkara.	6	Mahasiswa mengerti dan memahami serta dapat menjelaskan tentang Subjek dan Objek Sengketa Tata Usaha Negara	C4 (Analisis)
			7	Mahasiswa mengerti dan Memahami Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara	C2 (Pemahaman)
	M3	Melakukan simulasi persidangan PTUN dan menyusun kesimpulan perkara.	9	Mahasiswa mengerti dan memahami serta mampu Menjelaskan Pengajuan Gugatan Ke Peradilan Tata Usaha Negara	C4 (Analisis)
			10	Mahasiswa mengerti dan memahami serta mampu menjelaskan pengakuan hukum internasional	C2 (Pemahaman)
			11 Negara	Mahasiswa mengerti dan memahami serta mampu menjelaskan Pemeriksaan Sengketa Peradilan Tata Usaha	C2 (Pemahaman)
CPL-07,09	M2	Menyusun berkas gugatan TUN dan permohonan penundaan terkait keputusan tata usaha negara.	12	Mahasiswa mengerti dan Memahami tentang kedaulatan teritorial hukum internasional	C4 (Analisis)

Kode CPL	Kode CPMK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Level Taksonomi
CPL-10	M4	Mengevaluasi relevansi perkembangan historis hukum Islam terhadap problematika kontemporer hukum keluarga di Indonesia.	13	Mahasiswa mengerti dan Memahami tentang Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Hukum Pemerintah	C4 (Analisis)
			14	Mahasiswa mengerti dan Memahami tentang kedaulatan teritorial hukum internasional	C4 (Analisis)
			15	Mahasiswa mengerti dan Memahami tentang Putusan dan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara	C4 (Analisis)

B. METODE/CARA Pengerjaan Tugas

1. Setiap mahasiswa diharuskan mengerjakan tes formative, dan Latihan (soal esai) atau berdiskusi di forum diskusi dari pertemuan ke-2 sampai dengan pertemuan ke-15 sebagaimana yang tercantum pada modul pembelajaran mata kuliah hukum internasional' dan LMS
2. Selain mengerjakan tes formative, dan Latihan (soal esai) atau berdiskusi di forum diskusi ada tugas lain berdasarkan tabel berikut:

Minggu ke-	Nama Tugas	Tujuan Pembelajaran (Sub-CPMK)	Metode / Cara Pengerjaan Tugas
3	Pengantar dan Ruang Lingkup Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan kembali tentang Ruang Lingkup Hukum Acara PTUN	1. Pelajari materi pada Modul 1, KB 2 dan referensi pendukung. 2. Identifikasi aspek geografis, ekonomi, politik, agama, dan sistem hukum Jahiliyah.

Minggu ke-	Nama Tugas	Tujuan Pembelajaran (Sub-CPMK)	Metode / Cara Pengerjaan Tugas
			3. Analisis bagaimana masing-masing aspek tersebut menjadi konteks historis yang mempengaruhi hukum acara PTUN 4. Tuangkan hasil analisis dalam bentuk esai yang terstruktur.
6	Sengketa Khusus Di Peradilan Tata Usaha Negara	Mahasiswa mengerti dan Memahami Sengketa khusus diperadilan tata usah negara	1. Pilih satu tema subjek hukum acara ptun 2. Presentasikan analisis dalam bentuk laporan tertulis.
7	Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara	Mahasiswa mengerti dan Memahami peradilan elektronik pada peradilan tata usaha negara (C2)	1. Pilih satu tema peradilan elektronik pada PTUN 2. Jelaskan mengenai tema tersebut. 3. Rangkum perbandingan tersebut dalam tugas essay
10	Pemeriksaan Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara	Memahami Penyelesaian hukum sengketa PTUN(C2)	1. Pilih satu tema penyelesaian hukum sengketa PTUN 2. Presentasikan temuan dalam bentuk tabel atau diagram alur (flowchart) yang rapi.
14	Putusan dan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara	Mahasiswa mengerti dan Memahami tentang Putusan dan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (C4)	1. Pilih satu tema Putusan dan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara 2. RANGKUM dan buat makalah
15	Upaya Hukum Terhadap Putusan PTUN	Mahasiswa mengerti dan Memahami tentang upaya hukum terhadap putusan PTUN (C4)	1. Ikuti pembagian kelompok Upaya Hukum Terhadap Putusan PTUN 2. Lakukan riset kecil untuk menyusun argumentasi berdasarkan sejarah, dalil, dan konteks sosial. 3. Pada waktu yang ditentukan, post argumentasi Anda di forum dananggapi argumentasi kelompok lawan dengan santun dan berbasis ilmu.

C. DESKRIPSI LUARAN TUGAS:

Minggu ke-	Nama Tugas	Tujuan Pembelajaran (Sub-CPMK)	Deskripsi Luaran Tugas (Output yang Dihasilkan)
3	Pengantar dan Ruang Lingkup Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan kembali tentang Ruang Lingkup Hukum acara PTUN	Sebuah dokumen esai analitis (format .docx atau .pdf) dengan ketentuan: - Panjang 750 - 1000 kata. - Menggunakan bahasa Indonesia yang baku. - Terdiri dari Pendahuluan, Pembahasan (analisis per aspek), dan Kesimpulan. - Dilengkapi dengan kutipan dan daftar referensi (minimal 2 sumber selain modul).
6	Sengketa Khusus Di Peradilan Tata Usaha Negara	Mahasiswa mengerti dan Memahami sengketa khusus di PTUN C2	Sebuah laporan analisis kasus (format .docx atau .pdf) yang berisi: - Identifikasi kasus (nama peristiwa, sumber rujukan). - Uraian analisis yang menjawab ketiga poin di metode pengerjaan. - Kesimpulan tentang karakteristik ijtihad pada masa Nabi. - Daftar referensi yang digunakan.
7	Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara	Mahasiswa mengerti dan Memahami peradilan elektronik pada PTUN (C2)	Sebuah laporan / rangkuman Memuat tabel atau diagram perbandingan yang jelas. - Menampilkan foto/gambar pendukung yang relevan.

Minggu ke-	Nama Tugas	Tujuan Pembelajaran (Sub-CPMK)	Deskripsi Luaran Tugas (Output yang Dihasilkan)
			- Mencantumkan sumber rujukan (kitab atau artikel) secara singkat.
10	Pemeriksaan Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara	Memahami Penyelesaian hukum sengketa PTUN (C2)	Sebuah tabel atau diagram perbandingan (format .docx, .pdf, atau .pptx) yang berisi: - Kolom berisi hukum sengketa - Baris berisi penjelasan penerapan metode pada masing-masing hukum sengketa. - Bagian kesimpulan yang menyajikan contoh kasusnya
14	Putusan dan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara	Mahasiswa mengerti dan Memahami tentang Putusan dan pelaksanaan putusan PTUN (C4)	Sebuah laporan komparatif (format .docx atau .pdf) yang berisi: - Tabel perbandingan pasal per pasal. - Putusan dan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Kesimpulan tentang dampak tanggung jawab negara dalam hukum internasional di Indonesia.
15	Upaya Hukum Terhadap Putusan PTUN	Mahasiswa mengerti dan Memahami tentang Upaya hukum terhadap putusan PTUN (C4)	Partisipasi aktif dalam debat forum diskusi LMS yang dinilai berdasarkan: - Upaya hukum terhadap PTUN - Relevansi dengan sejarah dan perkembangan hukum Islam. - Etika Berdebat dan kemampuan menanggapi sanggahan. - Kuantitas partisipasi yang bermutu (minimal 2 post argumentasi utama dan 2 tanggapan).

D. KRITERIA PENILAIAN:

1. Esai Analitis, Laporan Analisis Kasus, Laporan Komparasi

- Kedalaman Analisis: Kemampuan menganalisis hubungan antara kondisi pra-Islam dengan perkembangan hukum Islam, bukan hanya mendeskripsikan.
- Kelengkapan Data: Mencakup aspek geografis, ekonomi, politik, agama, dan hukum secara memadai.
- Struktur dan Sistematika Penulisan: Esai tertata dengan baik (pendahuluan, isi, kesimpulan), alur logis.

- Kualitas Referensi dan Kutipan: Menggunakan sumber/referensi yang relevan dan mencantumkannya dengan benar.

2. Poster Digital, Tabel/Diagram Perbandingan

- Akurasi Konten: Ketepatan dalam menyajikan fatwa dan metode istinbath masing-masing sahabat.
- Nilai Informasi dan Kejelasan: Poster mudah dipahami, informatif, dan membandingkan dengan jelas.
- Desain dan Visual: Layout menarik, penggunaan warna, font, dan gambar yang mendukung.
- Orisinalitas dan Kreativitas: Keunikan dalam penyajian informasi.

E. RUBRIK:

1. Rubrik Penilaian Tugas Minggu ke-3: Pengantar dan Ruang Lingkup Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Kriteria penilaian	Skor 4 (sangat baik)	Skor 3 (baik)	Skor 2 (cukup)	Skor 1 (kurang)	Bobot	Skor
Kedalaman & kualitas analisis (c4)	Menganalisis secara komprehensif dan mendalam hubungan kausal antara berbagai aspek kondisi pra-Islam dengan kemunculan hukum Islam.	Menganalisis hubungan antara kondisi pra-Islam dengan hukum Islam, namun kurang mendalam atau hanya pada beberapa aspek.	Hanya mendeskripsikan kondisi pra-Islam tanpa analisis yang kuat kaitannya dengan hukum Islam.	Hanya menyebutkan fakta-fakta tanpa analisis atau analisisnya tidak relevan.	40%	
Kelengkapan data & materi	Membahas seluruh aspek (geografis, ekonomi, politik, agama, hukum) dengan data yang lengkap dan akurat.	Membahas hampir semua aspek dengan data yang cukup, namun ada 1 aspek yang kurang detail.	Hanya membahas sebagian aspek (2-3 aspek) atau data yang disajikan tidak lengkap.	Hanya menyentuh 1 aspek atau data yang disajikan sangat terbatas dan tidak akurat.	30%	
Struktur & sistematika penulisan	Esai terstruktur sangat rapi (pendahuluan, isi, kesimpulan), alur logis, mudah diikuti, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baku.	Esai terstruktur dengan baik, alur cukup logis, namun terdapat minor error dalam bahasa atau keterbacaan.	Struktur esai kurang jelas, alur logis terputus-putus, dan terdapat kesalahan bahasa yang mengganggu pemahaman.	Esai tidak terstruktur, alur tidak logis, dan sulit dipahami.	20%	
Kualitas referensi & kutipan	Menggunakan >2 sumber referensi yang relevan dan kredibel (selain modul) dan mencantumkan kutipan serta daftar pustaka dengan benar.	Menggunakan 2 sumber referensi yang relevan, namun terdapat minor error dalam teknik kutipan.	Hanya menggunakan 1 sumber referensi atau sumber yang digunakan kurang relevan/kredibel.	Tidak menggunakan sumber referensi sama sekali atau plagiat.	10%	
Total skor					100%	

2. Rubrik Penilaian Tugas Minggu ke-6: Sengketa Khusus Di Peradilan Tata Usaha Negara

Kriteria Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)	Bobot	Skor
<i>Akurasi & Kedalaman Analisis Kasus (C4)</i>	Analisis terhadap kronologi, metode ijtihad, dan nilai maslahat/ 'illat sangat mendalam, akurat, dan didukung oleh sumber yang kuat.	Analisis terhadap ketiga elemen cukup baik, namun salah satu elemen kurang mendalam atau kurang didukung argumen.	Analisis hanya pada 2 elemen atau analisisnya bersifat deskriptif dan kurang mendalam.	Analisis hanya pada 1 elemen atau tidak akurat dan tidak didukung sumber.	50%	
<i>Orisinalitas Pemilihan Kasus</i>	Memilih kasus yang unik, tidak umum, dan menantang, menunjukkan usaha eksplorasi literatur.	Memilih kasus yang relevan dan sesuai, meskipun termasuk kasus yang umum dibahas.	Memilih kasus yang sangat umum dan sudah banyak dibahas di modul/kelas.	Kasus yang dipilih tidak relevan atau tidak berkaitan dengan hukum keluarga.	20%	
<i>Struktur & Kejelasan Penyajian</i>	Laporan sangat terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami.	Laporan terstruktur dengan baik, namun alur penyajian kurang begitu lancar.	Struktur laporan kurang jelas, sehingga menyulitkan pemahaman.	Laporan tidak terstruktur dan sangat sulit dipahami.	20%	
<i>Kualitas Referensi</i>	Menggunakan sumber primer (kitab hadis) atau sumber sekunder yang kredibel. Kutipan tepat.	Menggunakan sumber sekunder yang kredibel, namun teknik kutipan ada minor error.	Hanya mengandalkan modul atau sumber yang kurang kredibel.	Tidak mencantumkan sumber.	10%	
<i>Total Skor</i>					100%	

3. Rubrik Penilaian Tugas Minggu ke-7: Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara

Kriteria Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)	Bobot	Skor
<i>Akurasi Konten (C2)</i>	Data fatwa, perbandingan, dan metode istinbath sangat akurat dan didukung sumber yang jelas.	Data akurat secara umum, namun terdapat 1-2 minor error atau kekurangan detail.	Terdapat beberapa kesalahan faktual atau informasi yang diberikan tidak lengkap.	Banyak informasi yang tidak akurat atau menyesatkan.	40%	
<i>Nilai Informasi & Kejelasan</i>	Informasi sangat informatif, padat, dan mudah dipahami. Perbandingan tersaji dengan sangat jelas.	Informasi cukup informatif dan jelas, namun membutuhkan usaha lebih untuk memahaminya.	Informasi kurang terorganisir dan sulit dipahami.	Informasi tidak jelas dan membingungkan.	30%	

<i>Desain & Visual</i>	Layout sangat menarik, profesional, pemilihan warna, font, dan gambar sangat mendukung konten.	Layout menarik dan cukup rapi, namun ada elemen desain yang kurang harmonis.	Layout sederhana atau kurang tertata, desain kurang mendukung konten.	Layout berantakan, desain tidak menarik dan mengganggu konten.	20%
<i>Orisinalitas & Kreativitas</i>	Poster menunjukkan gaya visual yang unik dan kreatif dalam menyajikan informasi kompleks.	Poster kreatif dan menarik, meski menggunakan template yang umum.	Poster kurang kreatif, hanya memindahkan teks ke dalam bentuk digital.	Poster biasa-biasa saja dan tidak menarik.	10%
<i>Total Skor</i>					100%

4. Rubrik Penilaian Tugas Minggu ke-10: Pemeriksaan Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara

Kriteria Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)	Bobot	Skor
<i>Kelengkapan & Akurasi Metode Istimbath (C2)</i>	Menyajikan seluruh metode istimbath utama dan urutannya untuk kedua mazhab dengan sangat akurat.	Menyajikan metode istimbath dengan akurat, namun ada 1-2 metode yang terlewat atau urutannya kurang tepat.	Hanya menyajikan beberapa metode saja atau terdapat kesalahan akurasi.	Daftar metode tidak lengkap dan banyak tidak akurat.	50%	
<i>Kualitas Contoh & Analisis Perbedaan</i>	Contoh hukum keluarga yang dipilih sangat relevan, dan analisis penyebab perbedaannya (karena metode) sangat jelas dan mendalam.	Contoh relevan, analisis penyebab perbedaan cukup jelas namun kurang mendalam.	Contoh kurang relevan atau analisis penyebab perbedaan sangat sederhana.	Tidak menyertakan contoh atau analisisnya salah/tidak relevan.	30%	
<i>Struktur & Kerapihan Penyajian</i>	Tabel/diagram sangat rapi, sistematis, dan mudah dipahami.	Tabel/diagram cukup rapi dan dapat dipahami.	Tabel/diagram kurang rapi dan menyulitkan pemahaman.	Tabel/diagram tidak terstruktur dan berantakan.	20%	
<i>Total Skor</i>					100%	

Rubrik Penilaian Tugas Minggu ke-14: Putusan dan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Kriteria Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)	Bobot	Skor
<i>Kedalaman Analisis Komparatif (C4)</i>	Analisis persamaan, perbedaan, dan latar belakang fiqh/historis sangat mendalam, kritis, dan insightful.	Analisis cukup mendalam dan lengkap, namun kurang menyelami akar perbedaan secara kritis.	Analisis bersifat deskriptif (hanya menyebutkan persamaan & perbedaan) dengan sedikit analisis.	Analisis sangat dangkal atau tidak sesuai dengan tugas.	50%	
<i>Ketepatan dalam Komparasi Pasal Struktur Penulisan & Kesimpulan</i>	Tabel perbandingan sangat lengkap dan akurat. Poin-poin yang dibandingkan sangat relevan. Laporan terstruktur dengan sangat baik. Kesimpulan yang dihasilkan kuat dan relevan dengan analisis.	Tabel perbandingan lengkap dan akurat, namun penyajiannya kurang sistematis. Laporan terstruktur. Kesimpulan ada namun kurang kuat atau kurang relevan.	Tabel kurang lengkap atau terdapat beberapa ketidakakuratan. Struktur laporan kurang baik. Kesimpulan lemah dan tidak menjawab analisis.	Tabel tidak lengkap dan banyak tidak akurat. Laporan tidak terstruktur dan tidak ada kesimpulan yang bermakna.	30%	
<i>Total Skor</i>					20%	
					100%	

6. Rubrik Penilaian Tugas Minggu ke-15: Upaya Hukum Terhadap Putusan PTUN

Kriteria Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)	Bobot	Skor
<i>Kualitas Argumentasi (C4)</i>	Argumentasi sangat kuat, didukung oleh dalil naqli (Quran/Sunnah) dan logika aqli yang relevan dengan sejarah hukum Islam.	Argumentasi kuat dan didukung dalil, namun kurang dikembangkan atau kurang relevan.	Argumentasi lemah, hanya berupa pendapat pribadi dengan sedikit atau tanpa dukungan dalil.	Argumentasi tidak berdasar, emosional, atau tidak relevan dengan topik.	40%	
<i>Kuantitas & Konsistensi Partisipasi</i>	Aktif dan konsisten memberikan gagasan utama (>2 post) dan menanggapi lawan (>2 tanggapan).	Cukup aktif (minimal memenuhi syarat kuantitas: 2 post + 2 tanggapan).	Hanya memenuhi sebagian syarat kuantitas (misal: hanya post gagasan atau hanya tanggapan).	Hampir tidak berpartisipasi atau partisipasi sangat minim.	30%	
<i>Etika & Responsivitas Berdebat</i>	Menanggapi sanggahan dengan santun, objektif, dan berbasis ilmu. Bahasa yang digunakan akademis.	Menanggapi dengan cukup baik dan santun, namun terkadang kurang fokus pada substansi.	Tanggapan terkadang emosional atau kurang santun, atau tidak menanggapi sanggahan lawan.	Tidak santun, menggunakan kata-kata kasar, atau menghina.	30%	
<i>Total Skor</i>					100%	

7. Rubrik Penilaian Sikap dan Partisipasi Pembelajaran

No	Nama Mahasiswa	Sikap yang Dimiliki Mahasiswa									Total nilai
		Nilai kemanusiaan	Etika akademik	Kerjasama	Disiplin	Tanggung jawab	Semangat Kejuangan	Komitmen	Kontribusi	Menghargai	
1											
2											
3											
dst											

*Setiap sikap diberikan skor 1-100

Rentang penilaian sikap

No	Interval Nilai	Kriteria
1	0-25	Sangat negatif
2	26-50	Negatif
3	51-75	Positif
4	76-100	Sangat Positif

F. PENENTUAN NILAI AKHIR MATA KULIAH

1. Jenis Penilaian dan Bobotnya Terhadap Nilai Akhir

Jenis Penilaian	Bobot
Sikap dan Partisipasi Pembelajaran	10%

Tugas Mandiri	20%
Tugas Terstruktur	15%
UTS	25%
UAS	30%
Total	100%

2. Pedoman Penilaian Akhir Mata Kuliah

Interval	Nilai	Nilai Angka
$x \geq 91$	A	4,00
$86 \leq x < 91$	A-	3,50
$81 \leq x < 86$	B+	3,25
$76 \leq x < 81$	B	3,00
$71 \leq x < 76$	B-	2,75
$66 \leq x < 71$	C+	2,50
$61 \leq x < 66$	C	2,25
$50 \leq x < 61$	D	2,00
$x < 50$	E	1,00

* Nilai Batas Lulus Program Studi:

1. Nilai Batas lulus (NBL) MK 3,00 (B)
2. Nilai Batas lulus (NBL) Sasaran Mutu 3,00 (B)
3. Prasyarat Mengikuti Ujian, mahasiswa mencapai kehadiran lebih dari atau sama dengan 75%
4. Kehadiran 61%-75% mahasiswa dapat mengikuti ujian dengan penugasan tambahan
5. Kehadiran kurang dari 60% mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti Ujian

Catatan: Jika setelah dilakukan perbaikan (Remedial) 2 kali, tetapi mahasiswa masih mendapat nilai di bawah NBL mata kuliah, Maka NBL dikembalikan ke NBL Nasional (2,00) dan dinyatakan Lulus